



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
RETHETIK

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja

TRIWULAN II 2025



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

Jalan Penjajap Timur, Kec. Pemangkat
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
(0562) 242066 | ppn.pemangkat@kkp.go.id

PPN PEMANGKAT
SMART
POWER. PROGRESS. ACCELERATE. IMPROVE. SUSTAINABILITY.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulan II 2025 ini sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan program yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pedoman pelaksanaan capaian kinerja pada tahun berikutnya. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan termasuk target kinerja yang belum tercapai, sehingga saran dan masukan serta dukungan dari seluruh pegawai PPN Pemangkat maupun kerjasama dari *stakeholder* dapat melengkapi dan menyempurnakan laporan kinerja dimaksud.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi institusi PPN Pemangkat pada khususnya, dan masyarakat nelayan pada umumnya

Sambas, 15 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,



Amam Tofani, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan II 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh selama Triwulan II. Laporan ini menggambarkan target dan capaian kinerja serta penyajian hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 8 indikator kinerja yang ditargetkan pelaksanaannya pada triwulan II, adapun hasilnya berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.1646/DJPT.1/RC.610/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Laporan Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, capaian kinerja PPN Pemangkat pada triwulan II telah melampaui target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi 110,89 (Kategori Istimewa).

Capaian Kinerja IKU						
	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian	 110,89 	 116,26 	 116,23	0,00	0,00	0,00
Skor Verifikasi	 110,89 	 116,26 	 116,23	0,00	0,00	0,00

Kedelapan IKU tersebut adalah Penerimaan PNBP Non SDA dengan persentase capaian 101,31%, Produktivitas perikanan tangkap dengan persentase capaian sebesar 120%, Tingkat Kinerja Pelabuhan dengan persentase capaian sebesar 109,66%, Nilai Pengendalian Lingkungan dengan persentase capaian sebesar 120%, Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dengan persentase capaian sebesar 103,26%, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan persentase capaian sebesar 117,65%, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan dengan persentase capaian sebesar 120% dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan persentase capaian sebesar 110,59%.

Mekanisme laporan kinerja triwulan II 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada laporan ini

tersaji analisis capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama pada triwulan I tahun 2020 s.d. 2024, dibandingkan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I); selain itu juga disajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja masa yang akan datang. Kami berharap kinerja yang telah dicapai pada triwulan II dapat terus ditingkatkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Secara Geopolitis lokasi PPN Pemangkat memiliki nilai strategis, berada di garda depan Laut Natuna Utara, dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konsekuensinya memberikan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif memiliki akses pasar luar negeri yang menjanjikan dan implikasi negatif rawan terhadap pelanggaran dan pencurian ikan oleh kapal ikan asing.

Sebagai pelabuhan perikanan yang berada di lingkaran luar, perannya harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan agar dapat memfasilitasi perkembangan usaha penangkapan ikan yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pengumpulan data dan penyuluhan, serta pusat pelayanan informasi. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kegiatan pengembangan prasarana perikanan tangkap di lingkaran luar wilayah Indonesia (*outer ring fishing port*) dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur manajemen operasional (*good operation and management practice*) dan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perikanan (*one-stop shopping fishing port*).

Secara krusial dari beberapa pemanfaatan sumberdaya ikan sudah berada dalam kondisi *overexploited*, seperti udang penaeid, lobster dan cumi-cumi. Kendatipun demikian, sumberdaya ikan demersal, pelagis kecil, pelagis besar dan ikan karang konsumsi masih terbuka peluang untuk dimanfaatkan secara optimal.

Memperhatikan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, sumber daya manusia serta permintaan pasar dalam dan luar negeri yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menggembirakan untuk produk-produk perikanan seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein yang menyehatkan dan bebas kolesterol, maka sangat memungkinkan untuk membangun industri perikanan

yang kokoh, mandiri dan berkelanjutan serta memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri serta meningkatkan penerimaan devisa Negara yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu perumusan kebijakan pembangunan perikanan tangkap nasional yang tepat, terarah, terpadu dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan perikanan tangkap sebagaimana dijelaskan pada alinea di atas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah membangun berbagai prasarana perikanan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.

Perkembangan armada kapal perikanan yang berada di PPN Pemangkat dan sekitarnya selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat dengan ukuran kapal yang semakin besar. Kecenderungan peningkatan ini diprediksi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Terutama sebagai akibat kenaikan bahan bakar yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional penangkapan ikan, khususnya bagi kapal ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPP NRI 711 (Zona I) akan melakukan relokasi pelabuhan pangkalan dari pulau Jawa (Jakarta, Pekalongan dan Pati) ke wilayah yang berdekatan dengan *fishing ground*, diantaranya ke PPN Pemangkat.

Tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan tangkap di PPN Pemangkat harus didukung oleh kegiatan usaha penunjang berupa industri pendukung dalam kawasan pelabuhan. Antara lain industri galangan kapal, industri perakitan alat tangkap, industri perbankan, industri pengolahan hasil perikanan, suplai perbekalan (air, es dan BBM), sektor pariwisata dan perdagangan.

1.2. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- a. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 41 A, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Maka fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;\
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;

- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau pengendalian lingkungan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Visi

Selaku Unit Pelaksana Teknis Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pusat Industri Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat agar Tercapai Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berkelanjutan menuju Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”.

Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktivitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

Misi

Untuk dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan zona integritas sesuai standar ISO 9001:2015;
2. Peningkatan kompetensi nelayan di pelabuhan perikanan;
3. Peningkatan kontribusi ekonomi melalui investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan;
4. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap melalui penyiapan data dan informasi di pelabuhan perikanan yang akurat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan SDM dan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.

Tujuan

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zona integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan penerapan ISO 9001:2015 dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai alat ukur peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Peningkatan Kompetensi nelayan di PPN Pemangkat dengan melaksanakan bimbingan teknis baik penangkapan ikan, keselamatan pelayaran dan mutu hasil perikanan yang difasilitasi program internal maupun program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan dengan melakukan sosialisasi, promosi dan peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan peluang usaha di PPN Pemangkat;
4. Menyiapkan data dan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh PPN Pemangkat sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap. Adapun perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perencanaan Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Perjanjian kinerja PPN Pemangkat pada tahun 2025 dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPN Pemangkat.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Anam Tofani**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

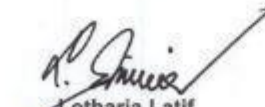
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pemangkat


Anam Tofani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

Gambar 1. Perjanjian Kinerja 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. SASARAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Level I DJPT 2025 yaitu :

1. Kesejahteraan Nelayan Meningkat
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

3.2. SASARAN STRATEGIS PPN PEMANGKAT

Sasaran kinerja yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan upaya mendukung ketercapaian sasaran strategis level I DJPT, maka sasaran strategis dan indikator kinerja PPN Pemangkat disusun berdasarkan indikator kinerja level I DJPT menjadi program-program yang dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja PPN Pemangkat yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut:

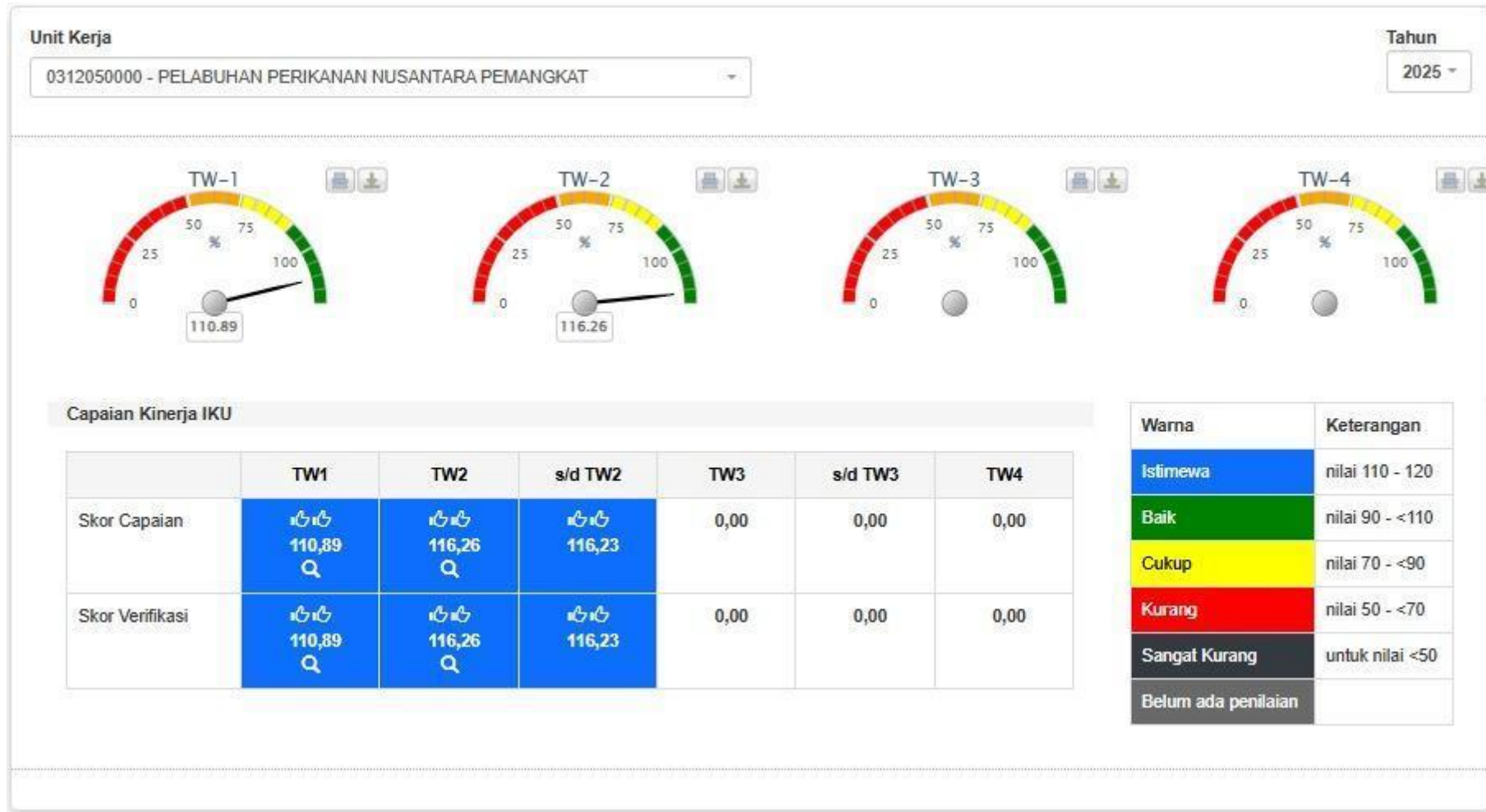
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	984,73
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	9.090,96
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	40
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5

3.3. CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Capaian kinerja PPN Pemangkat secara periodik dinilai melalui website resmi kinerja lingkup KKP (kinerjaku.go.kkp.id). Capaian nilai triwulan II tergambar sebagai gambar 4 berikut. Pada triwulan II skor capaian kinerja organisasi PPN Pemangkat adalah 116,23 dengan predikat **Istimewa**



Gambar 4. Capaian Kinerja 2024

Capaian kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sasaran kinerja PPN Pemangkat. Adapun rincian capaian kinerja PPN Pemangkat triwulan II Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rincian Capaian Kinerja Triwulan II 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Capaian	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	964,73	289,42	550,35	190
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkatkan	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat (Ton)	9.090,96	2.727,29	4.516,5	120
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal dan bertanggung jawab	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	87	87	95,5	110
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	30,1	30,1	96,49	320,56
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	496	492	509	103
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	85	85	100	118
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	76	76	100	131,6
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,5	88,5	95	107

3.4. URAIAN CAPAIAN KINERJA PPN PEMANGKAT

Dalam bab ini dijelaskan capaian setiap indikator kinerja terhadap

1. Target pada triwulan II yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kinerja dan rincian target IKU;
2. Perbandingan capaian kinerja pada IKU yang sama pada triwulan II tahun 2020 s.d. 2024;
3. Perbandingan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan; dan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

SS.1 Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap meningkat di PPN Pemangkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 1 yaitu Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat

IK. 1. Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, baik penerimaan fungsional maupun penerimaan umum. Perhitungan indikator ini yaitu nilai akumulasi Penerimaan atas jasa-jasa bulan berjalan. Berikut Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian IK Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat

SS-1					Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-1					Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
129	95	258	459	464	964,73	289,42	550,35	57	190

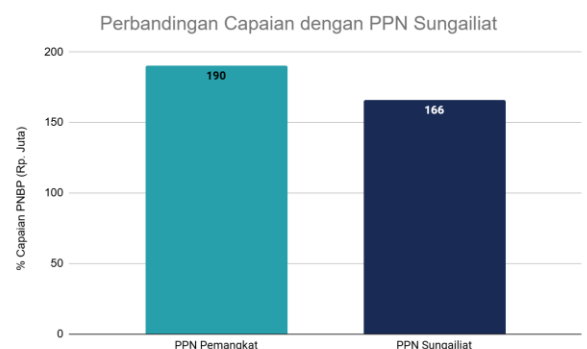
Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 289,42 juta, berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp. 550,35 juta, dengan persentase sebesar 190%. Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka persentasenya sebesar 57% tingginya capaian pada triwulan II ini dikarenakan adanya penambahan dari lelang BMN senilai Rp. 126.380.000,00. dan sewa rumah dinas sebesar Rp. 2.273.040,00.



Perbandingan capaian dari tahun 2020 s.d. 2025 sebagaimana tergambar pada diagram disamping, terlihat tren kenaikan capaian dari tahun 2020 s.d. 2025, puncaknya pada triwulan II tahun 2025.



Indikator kinerja PNPB ini dilaksanakan oleh semua UPT lingkup DJPT. Capaian indikator kinerja PNPB PPN Pemangkat jika dibandingkan dengan capaian pada indikator yang sama pada PPN Sungailiat maka tergambar sebagaimana gambar disamping. Persentase capaian PNPB pada PPN Pemangkat lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian pada PPN Sungailiat.



Capaian ini dikarenakan peran serta seluruh komponen mulai dari petugas pelayanan dan pengguna jasa yang berada di lingkungan PPN Pemangkat. Selain itu, untuk PNPB Non SDA terdapat perbaikan data dan system dalam pendataan sehingga data yang dicapai menjadi akuntabel.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini disebabkan oleh kinerja ASN (PNS dan PPPK) yang membaik sehingga pelayanan yang dulu belum ditangani secara optimal, saat ini dengan sistem yang baru berdampak pada peningkatan

pelayanan menjadi lebih baik. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 10.150.000,00,00 sampai dengan triwulan II ini belum terealisasi karena efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya peningkatan IKU ini diantaranya adalah :

1. Penggunaan aplikasi JALA PUKAT untuk pemungutan jasa kepelabuhanan (Pengadaan Air Bersih, Sewa Alat Berat, Listrik, Pas Masuk), dengan aplikasi tersebut data jasa kepelabuhanan dapat berekonsiliasi dengan baik;
2. Penggunaan aplikasi SIJAKA untuk penarikan jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penertiban Pas Masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Dalam hal penertiban pas masuk terdapat permasalahan yang dihadapi yakni kurang efektif dan efisiennya sistem, karena masih menggunakan sistem manual. Rekomendasinya adalah kedepan supaya ada peningkatan sistem pas masuk menggunakan portal semi otomatis.

SS.2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pemangkat meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 2 yaitu Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

IK. 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan pengukuran jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan di PPN Pemangkat. Berikut capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap periode triwulan II tahun 2025 sebagaimana tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap 2025

SS-2					Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat				
IKU-2					Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)				
Realisasi Triwulan I					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Terget Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
205	3.040	1.920	5.499	5.163	9.090,96	2.727,29	4.516,5	50	120

Capaian pada IK Volume Produksi Perikanan Tangkap ini sampai dengan akhir Juni 2025 sebesar 4.516,5 Ton. Target untuk triwulan II sebesar 2.727,29 Ton, sehingga persentase capaiannya adalah 120%. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 9.090,96 Ton, maka persentase capaiannya adalah 120%.

Indikator kinerja ini telah dilaksanakan secara lima tahun berturut-turut, adapun perbandingan capaiannya tampak fluktuatif sebagaimana gambar disamping.

Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan beberapa UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka capaian Volume Produksi PPN Pemangkat masih lebih besar jika dibandingkan PPN Sungailiat.

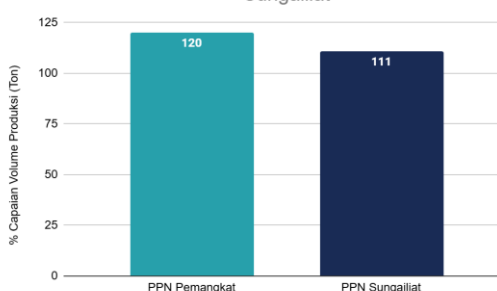
Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah pencatatan data produksi dengan baik melalui system *online* (Aplikasi PEDATI) setiap kapal yang melakukan pembongkaran di dermaga maupun kapal angkut ikan yang masuk dari pelabuhan lain (*port to port*) tercatat dengan baik serta ikan yang masuk melalui pengangkutan dari darat.

Dalam mendukung pencapaian target volume produksi, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja petugas data dan keaktifan

Volume Produksi Perikanan Tangkap 2020-2025



Perbandingan Capaian IK Volume Produksi dengan PPN Sungailiat



penginputan pada aplikasi PIPP yang mengakibatkan pendataan produksi membaik. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 4.919.000,00, dengan rincian kegiatan pendukung diantaranya adalah Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1.800.000,00 dan Operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebesar Rp. 3.119.000,00. sampai dengan triwulan II ini belum ada penyerapan anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah adanya

1. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
3. Penggunaan aplikasi PIPP.

SS.3 Pengelolaan PPN Pemangkat yang Optimal dan Bertanggung jawab

Terdapat 3 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi, Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai) dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen).

IK. 3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNPB yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan. Penanggung jawab indikator kinerja ini adalah Tim Kerja TKPU, adapun pelaporannya bersifat tahunan, sehingga realisasi capaian belum dapat tersaji dalam laporan triwulan II.

Tabel 6. Capaian IK Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi

SS-3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab				
IKU-3					Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)				
Realisasi Triwulan I					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Tingkat ketercapaian IKU ini pada tahun 2024 adalah 100%, hal ini dikarenakan adanya pendelegasian yang jelas terhadap pegawai yang menangani, monitoring dari ketua tim kerjanya dan tanggung jawab serta komitmen pegawai yang bersangkutan, hal ini tercermin dalam laporan SKP.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya

1. Melakukan evaluasi dan rekap data jangka waktu kontrak perusahaan di lingkup PPN Pemangkat secara berkala oleh petugas; dan
2. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Fasilitas dan Penggunaan Sistem Informasi Perusahaan (SIPAUS);

IK. 4. Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)

Indikator kinerja PPN Pemangkat merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008).

Pengukuran terhadap capaian indikator Tingkat Kinerja adalah berdasarkan hasil rata-rata nilai evaluasi pada aplikasi PIPP selama triwulan I 2024 dengan kriteria sebagai berikut

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP) | 7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan |
| 2. E-logbook | 8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan |
| 3. Aplikasi SPB-online | 9. Panjang Dermaga |
| 4. SHTI | 10. Kedalaman Kolam |
| 5. Realisasi Penyerapan Anggaran | |
| 6. Pendapatan Pelabuhan | |

- | | |
|---|---|
| 11. Sarana Perbaikan (<i>docking</i> , bengkel) | Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi |
| 12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan | 20. Pelaksanaan K5 |
| 13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan | 21. Penyaluran Air Bersih (kapal dan industry pengolahan) |
| 14. Pelayanan Tambat Labuh | 22. Penyaluran Es (Kapal) |
| 15. Produksi Perikanan | 23. Penyaluran BBM (kapal) |
| 16. Frekuensi Kunjungan Kapal | 24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP |
| 17. STBLK | 25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan |
| 18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 26. Penyerapan tenaga Kerja |
| 19. Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya | 27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan |

Capaian kinerja IK tersebut tersaji dalam tabel 7 berikut

Tabel 7. Capaian IK Kinerja PPN Pemangkat

SS-3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab				
IKU-4					Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	83,17	84	87	90,5	87	87	95,5	110	110

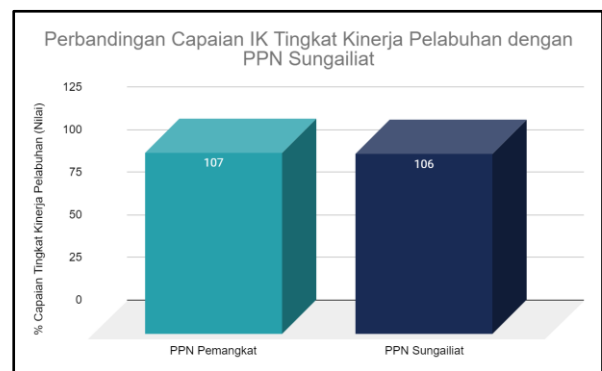
Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa realisasi capaian IKU Tingkat Kinerja adalah 95,5 atau persentase capaian sebesar 110% dari target triwulan II yang telah

ditentukan. Perlu disampaikan bahwa target triwulan, tahunan maupun target renstra adalah sama yakni 87.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, maka terlihat tren kenaikan sebagaimana gambar di atas.



Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, capaian tingkat kinerja PPN Pemangkat sedikit tingkat lebih tinggi jika dibanding PPN Sungailiat. Indikator ini dapat tercapai karena adanya pendataan yang membaik dan penginputan di aplikasi PIPP yang aktif petugas.



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini adalah dengan bertambahnya SDM (PPPK dan petugas data) sehingga dapat terbantu dalam hal penginputan kegiatan operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP. Dari segi anggaran, terdapat pagu sebesar Rp.158.019.000,00 untuk operasional kegiatan Perusahaan di Pelabuhan Perikanan dan terealisasi sebesar Rp. 22.407.000,00 atau sebesar 14,18%. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan

1. peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP melalui Bimtek;
2. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
4. Peng-entry-an data hasil produksi perikanan yang secara kontinyu pada aplikasi PIPP.

IK. 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan yang diterbitkan. Adapun pembobotannya adalah sebagai berikut

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%);
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); dan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ada pada triwulan IV 2023. Sesuai dengan manual IKU, periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, untuk laporan triwulan II 2025 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

SS-3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab				
IKU-5					Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
Realisasi Triwulan I					2024				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Terget Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	100	0	0	0	0

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator baru yang ada pada triwulan keempat 2023, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini adalah :

1. Penggunaan aplikasi Teman SPB dalam pelayanan kesyahbandaran;
2. Petugas secara rutin melakukan rekonsiliasi data SPB, STBLK dan SHTI; dan
3. Petugas melakukan pelayanan dengan baik pada pengguna jasa.

IK. 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sesuai dengan perubahan perjanjian kerja kedua. Adapun perhitungannya didasarkan pada persentase pengembangan fasilitas yang telah dilakukan dibandingkan dengan *master plan* yang dimiliki oleh PPN Pemangkat. Pengukuran indikator ini bersifat tahunan sehingga hasil pengukuran belum dapat tersaji dalam laporan triwulan II 2025.

Tabel 9. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab				
IKU-6					Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Terget Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-

Pada tahun 2024 PPN Pemangkat memiliki target IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan sebesar 40 persen. Sesuai dengan manula IKU periode pelaporannya secara tahunan, sehingga belum bisa diukur capaiannya baik dengan target triwulanan, target tahunan dan target pada renstra. Pelaporan IKU ini dilakukan oleh seluruh UPT lingkup DJPT secara serentak pada akhir tahun.

Bercermin pada keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan karena telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pada tahun 2023 dengan baik seperti pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan jalan komplek, perbaikan dan penambahan

jaringan (*bandwidth*) internet, pemeliharaan dan penambahan jaringan CCTV, perbaikan *drainase*, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air bersih, pemeliharaan dermaga dan pemeliharaan pagar keliling.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan bertambahnya SDM dari penambahan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat berkerja dengan baik. Selain itu adanya pembagian tugas kepada anggota Tim Kerja TKPU sebagai penanggung jawab untuk setiap item pekerjaan. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 88.789.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.407.000,00 atau dengan persentase sebesar 25,24%. Anggaran tersebut telah digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

IK. 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formula UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang baru ada pada perjanjian kerja kedua. Capaian indikator tersaji pada tabel 10 di bawah ini

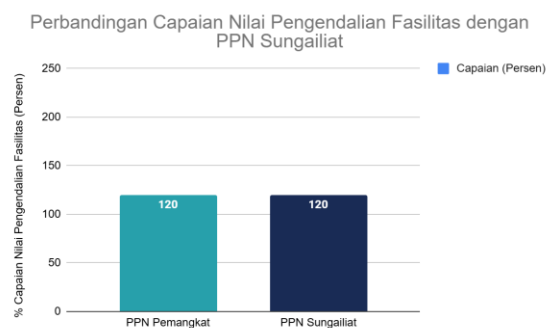
Tabel 10. Capaian IK Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab				
IKU-7					Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
0	0	0	0	98,09	30,10	30,10	96,24	320	120

Pada tahun 2025 PPN Pemangkat memiliki target IKU Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan sebesar 30,10, jika dibandingkan dengan target tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 0,9. Adapun target setiap triwulan sama dengan target tahunan yakni 30,10. Pada triwulan II 2025 ini tercapai nilai sebesar 96,24 atau dengan persentase sebesar 120%.

Dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru ada pada triwulan IV 2023, maka capaian pada capaian pada triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan target pada renstra dan juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II pada kurun waktu tahun 2020 s.d. 2023. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2024, maka mengalami penurunan sebesar 1,85 atau sebesar 1,87%.

Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan standar nasional atau dengan UPT dalam satu WPP 711 (PPN Sungailiat) dapat dilihat pada gambar berikut. Terlihat capaian Nilai Pengendalian Fasilitas pada PPN Pemangkat sama persentase capaiannya. Keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU ini karena



terpenuhinya dokumen yang diperlukan dalam standar penilaian pada Aplikasi Selaraskan. Secara berkala setiap bulan dilakukan monitoring pemenuhan dokumen dengan *lead* dari Tim Kerja TKPU.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan karena keterlibatan seluruh SDM dari lintas Tim Kerja dalam pemenuhan dokumen penilaian Selaraskan. Pada tahun 2025 ini, pelaksanaan IKU Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp.10.580.000,00 dan

sampai dengan akhir triwulan II belum terealisasi dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.

SS.4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di PPN Pemangkat

Terdapat 2 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 4 yaitu Pengelolaan Awak Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di PPN Pemangkat yaitu IKU 8 dan IKU 9.

IK. 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja ini menunjukkan Jumlah kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Sesuai dengan manual IKU-nya, perhitungannya capaian pada triwulan II merupakan penjumlahan capaian pada tahun 2023 ditambah capaian pada triwulan II. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

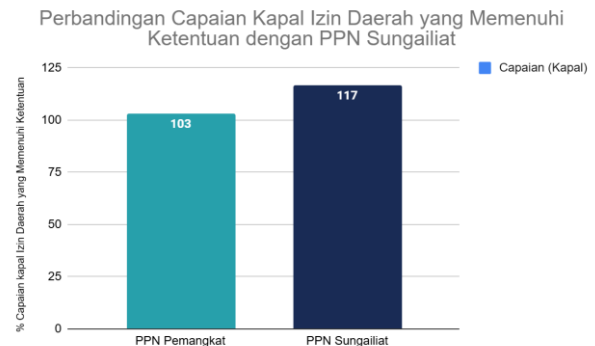
SS-4					Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-8					Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Terget Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
0	0	0	251	480	496	492	509	103	103

Diketahui bahwa capaian triwulan II tahun 2025 adalah 509 kapal dari target triwulan II sebanyak 492 kapal atau sebanyak 17 kapal. Target tahunan adalah sebesar 496 kapal dan target triwulanan sebesar 492 kapal. Sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentase capaian sebesar 103% dan jika dibandingkan dengan target triwulan II maka persentasenya adalah 103%.



Pada triwulan II tahun 2023, jumlah sertifikat kelaikan kapal yang diterbitkan oleh PPN Pemangkat sebanyak 158 kapal. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2023, maka terjadi lonjakan capaian sebagaimana tersaji pada gambar di atas. Dikarenakan IK ini merupakan IK baru pada tahun 2023, maka tidak dapat menyajikan data-data capaian pada tahun 2020 s.d. 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat, persentase capaian PPN Pemangkat lebih rendah sebagaimana tersaji pada gambar di samping.



Tingkat ketercapaian IK ini dikarenakan patuhnya kapal perikanan dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebelum masa berlakunya berakhir. Disamping itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023, sangat membantu pemilik kapal karena pemilik kapal dapat mengajukan pembaruan SKKP tanpa proses pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku SKKP tersebut lebih panjang dari sebelumnya hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Disamping itu, tingkat capaian ini dipengaruhi banyaknya pengajuan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dari kapal perikanan izin daerah yang berada di Pelabuhan Binaan seperti PP Kuala Singkawang, PPP Sungai Rengas, dan PP Sungai Kakap. SKKP merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Dalam mendukung pencapaian IKU dokumen kapal perikanan yang diterbitkan didukung dengan tim SKKP yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator dan 5 orang verifikator. Kesemuanya masuk kedalam surat tugas kepala Pelabuhan Nomor B.2152/PPN.PMK/KP.440/VIII/2023.

IK. 9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang bersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang

memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Adapun formula perhitungannya adalah persentase jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL dan telah tersertifikasi dibandingkan dengan seluruh jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL. Sesuai dengan manual IKU, pelaporan IK ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat tersaji datanya pada laporan triwulan II.

Tabel 12. Capaian IK Nilai Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

SS-4					Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-9					Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)				
Realisasi Triwulan I					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-

Dikarenakan pelaporannya bersifat tahunan maka tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan II 2024 dan capaian triwulan II tahun-tahun sebelumnya. Secara serempak IK ini dilaporkan secara tahunan oleh seluruh UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat.

Pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL.

Faktor yang penentu keberhasilan capaian yaitu kesadaran nelayan sebagai pelaku utama dan pemilik kapal sebagai pelaku usaha, ketersediaan petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator Perjanjian Kerja Laut (PKL). Petugas telah melaksanakan PKL dengan beberapa nelayan yang difasilitasi oleh PPN Pemangkat. Keberhasilan Sosialisasi terkait perlindungan awak kapal perikanan oleh Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Pemangkat dan antusiasme nelayan dan kesadaran terkait risiko kerja di kapal perikanan menyebabkan banyaknya nelayan mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga andil pemilik kapal mengajak diskusi seluruh ABK kapalnya agar mau menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang kemudian

disahkan oleh Syahbandar di PPN Pemangkat. Sehingga persentase Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan mencapai target.

SS.5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

IK. 10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat (nilai)

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 13. Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-10					Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Terget Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	75,5	-	-	-	-

IKU Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat sesuai dengan manual IKU, pelaporannya bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian pada triwulan II. Begitu juga dengan tahun tahun sebelumnya, pelaporan capaian ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun-tahun sebelumnya. Target pada tahun 2025 adalah sebesar 75,5 dan pelaporan IKU ini serentak dilakukan secara tahunan oleh semua UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada UPT lain. Perbandingan capaian dengan pelabuhan lain seperti grafik di atas, PPN Pemangkat dengan nilai capaian yaitu 90,90 lebih tinggi dari UPT yang lain.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.830.000,00 dan sampai dengan akhir triwulan II belum terealisasi.

Dalam pelaksanaan ZI WBK di PPN Pemangkat, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU tersebut, antara lain:

1. Adanya rapat yang dilakukan secara berkala agar terkontrolnya progress pemenuhan data dukung;
2. Adanya pengerjaan dokumen data dukung yang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam LKE;
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

IK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat

Indikator kinerja ini merupakan hasil pengawasan Itjen kepada PPN Pemangkat berdasarkan LHP yang telah terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan I 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh PPN Pemangkat dan menjadi objek pengawasan. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut

Tabel 14. Capaian IK Persentasi Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Perbaikan Kinerja

SS.5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-11					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
0	0	0	85,71	100	85	85	100,0	118	118

Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025 dari target yang telah ditetapkan sebesar 85 berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100 dengan persentase sebesar 118%. Target tahunan maupun target triwulan memiliki besaran yang sama, sehingga persentase capaiannya sama yakni 118%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan perbedaan

periode pelaporan dengan tahun tahun sebelumnya. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target renstra.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Digunakan untuk Perbaikan Kinerja didukung oleh penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Nomor tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan tentang Evaluasi Pelayanan Publik. Semua data dukung sesuai rekomendasi pada LHP Inspektorat Tersebut tersebut diatas telah disampaikan ke Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Secara umum, sampai dengan akhir triwulan II 2024 tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan saran hasil evaluasi/pengawasan Inspektorat Jenderal serta melakukan koordinasi secara intensif kepada Inspektorat Jenderal dan DJPT. Jika dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama dengan beberapa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, didukung dengan sumber daya manusia dalam bentuk tim pengelolaan kinerja dan tim pelayanan publik. Kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara online dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien baik dari segi sumber daya manusia dan waktu penyelesaiannya. Adapun dari segi anggaran kegiatan ini tidak terdapat anggaran dikarenakan sudah menggunakan Aplikasi *sidak.kkp.go.id* dalam pengawasan dan tindak lanjut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) (Perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT).

IK. 12. Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP

menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%). Capaian indikator kinerja ini dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian indikator ini tersaji pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Capaian IK Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-12					Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)				
Realisasi Triwulan I					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	88	-	-	-	-

Belum ada capaian IKU ini pada triwulan II 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan II 2024, target tahunan, target triwulan II tahun-tahun sebelumnya dan dengan target pada renstra.

Secara serentak pelaporan IKU ini dilaksanakan pada periode tertentu, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada UPT lain lingkup DJPT pada triwulan II ini.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menggunakan Aplikasi E-sakip Reviu dalam penyampaian dokumen pemenuhan SAKIP, serta telah dilakukan reviu secara berkala terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan dokumen SAKIP ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja. Langkah yang akan dilakukan antara lain menyelenggarakan rapat monitoring dan

evaluasi capaian kinerja secara berkala dan melakukan sosialisasi dan dialog kinerja kepada seluruh pegawai.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Dari segi anggaran, telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 1.830.000,00 untuk kegiatan Pengelolaan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. sampai dengan akhir triwulan II belum ada realisasi penyerapan anggaran. Program yang menunjang capaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja yaitu program dukungan manajemen–layanan manajemen keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2024 yaitu meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran lingkup KKP serta peningkatan kualitas monev Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai, evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan memanfaatkan secara optimal hasil monev untuk umpan balik perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program.

IK. 13. Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat (Persen)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan Indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independent. Penilaian indikator ini berdasarkan penilaian pada website ropeg.kkp.go.id yang diukur menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari Riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari di bawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat, Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi:

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan Disiplin Pegawai, diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Berikut adalah capaian indikator IP ASN PPN Pemangkat 2025 (Tabel 16).

Tabel 16. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-13					Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
65	53,84	77,97	77,06	90,02	87	82	87,47	101	107

Capaian IP ASN pada triwulan II 2025 sebesar 87,47 atau pada kategori Tinggi. Data diambil berdasarkan website Ropeg KKP dan surat dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B. 2761 /DJPT.1/TU.410/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025 tentang Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN Semester I Tahun 2025 lingkup DJPT. Jika dibandingkan dengan target triwulan II maka persentasenya adalah sebesar 107%, jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentasenya adalah 101%. Secara umum capaian pada triwulan II atau semester I 2025 telah melampaui target baik target triwulan maupun tahunan. Jika dibandingkan capaian pada triwulan II tahun-tahun sebelumnya maka terjadi fluktuasi dengan puncak pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 (sebagai baseline penghitungan aspek kinerja pada IP ASN 2024) predikat kinerja pegawai Sangat Baik lebih banyak dibandingkan dengan predikat kinerja pegawai Sangat Baik pada tahun 2024 (sebagai baseline penghitungan IP ASN 2025). Perbandingan capaian nilai IP ASN dengan UPT lain

lingkup DJPT sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIJEN PERIKANAN TANGKAP	93	22.69	90.76 %	27.35	68.38 %	25.48	84.93 %	5	100 %	80.52	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	57	22.54	90.16 %	25.98	64.95 %	25.79	85.97 %	4.95	99 %	79.26	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	66	23.64	94.56 %	28.73	71.83 %	27.5	91.67 %	5	100 %	84.86	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	70	23.43	93.72 %	26.89	67.22 %	25.5	85 %	5	100 %	80.82	SEDANG
5	DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	32	22.97	91.88 %	28.28	70.7 %	26.56	88.53 %	5	100 %	82.81	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	73	22.95	91.8 %	29.68	74.2 %	26.64	88.8 %	5	100 %	84.27	TINGGI
7	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	30	23	92 %	23.58	58.95 %	25.5	85 %	5	100 %	77.08	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	82	22.74	90.96 %	28.39	70.97 %	27.32	91.07 %	5	100 %	83.45	TINGGI
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	72	23.26	93.04 %	32.6	81.5 %	27.29	90.97 %	5	100 %	88.15	TINGGI
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	77	22.27	89.08 %	29.26	73.15 %	26.88	89.6 %	5	100 %	83.42	TINGGI
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	50	22.3	89.2 %	33.58	83.95 %	27.5	91.67 %	5	100 %	88.38	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	67	22.09	88.36 %	26.08	65.2 %	27.54	91.8 %	5	100 %	80.71	SEDANG
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	48	23.65	94.6 %	30.34	75.85 %	26.98	89.93 %	5	100 %	85.97	TINGGI
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	55	22.64	90.56 %	29.1	72.75 %	26.91	89.7 %	5	100 %	83.65	TINGGI
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	55	22.18	88.72 %	32.99	82.48 %	27.64	92.13 %	5	100 %	87.8	TINGGI

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	45	22.44	89.76 %	28.51	71.28 %	26.89	89.63 %	5	100 %	82.84	TINGGI
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	63	21.98	87.92 %	34.88	87.2 %	27.22	90.73 %	5	100 %	89.09	TINGGI
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	45	22.11	88.44 %	34.81	87.03 %	25.56	85.2 %	5	100 %	87.47	TINGGI
19	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	59	22.29	89.16 %	30.79	76.97 %	27.46	91.53 %	5	100 %	85.54	TINGGI
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	39	22.31	89.24 %	28.13	70.32 %	27.18	90.6 %	5	100 %	82.62	TINGGI
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	62	21.61	86.44 %	36.69	91.72 %	27.34	91.13 %	5	100 %	90.64	TINGGI
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	65	22.69	90.76 %	29.96	74.9 %	27.38	91.27 %	5	100 %	85.03	TINGGI
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	63	22.38	89.52 %	34.96	87.4 %	27.3	91 %	5	100 %	89.64	TINGGI
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	46	22.72	90.88 %	31.34	78.35 %	25.65	85.5 %	5	100 %	84.71	TINGGI
25	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	41	22.07	88.28 %	33.05	82.63 %	25.61	85.37 %	5	100 %	85.74	TINGGI
26	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	52	22.4	89.6 %	33.51	83.78 %	27.5	91.67 %	5	100 %	88.42	TINGGI
27	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	39	23.08	92.32 %	32.76	81.9 %	27.44	91.47 %	5	100 %	88.27	TINGGI
28	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	28	23.04	92.16 %	34.87	87.17 %	25.71	85.7 %	5	100 %	88.62	TINGGI
29	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	27	21.85	87.4 %	33.61	84.02 %	25.56	85.2 %	5	100 %	86.02	TINGGI

Tim Kerja Dukungan Manajerial telah mengakomodir peningkatan IP ASN Pegawai PPN Pemangkat melalui berbagai diklat. Komitmen keterlibatan pimpinan dalam pencapaian IP ASN diturunkan melalui memorandum Kepala Pelabuhan Nomor 40/PPN.PMK/KP.510/II/2025, tanggal 21 Februari 2025 tentang Perintah Mengikuti

Pengembangan Kompetensi. Berikut uraian capaian IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat s.d. triwulan II 2025.

#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi					Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan	
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP			Prosentase
1	ANAM TOFANI	S-2	23	92 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	93	SANGAT TINGGI
2	DWI ARI PRIYANTO	S-2	23	92 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	93	SANGAT TINGGI
3	DOL ROHMAN	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	15	15	0	30	75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	80	SEDANG
4	SUHARTO	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	IWAN A	S-2	23	92 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	93	SANGAT TINGGI
6	ILHAM TAKBIRIDUL ADHAM	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	ARI YUMANSYAH	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
8	MUHAMMAD PADLI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
9	MUHAMMAD SOLIKHIN	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI
10	MUHAMMAD SYAIBAN	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	15	15	0	30	75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	80	SEDANG
11	RANDHI ARYANTO SUE	S-1	20	80 %	-	15	0	10	25	62.5 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	75	SEDANG
12	DICKY SEPTIANDI	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
13	ASRIADI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
14	SAPTONY	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
15	M. SYAFRIL	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI

#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan		
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin			IP	Prosentase
16	MALASARI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	0	22.5	56.25 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	72.5	SEDANG
17	ASRIADI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
18	JUNITA ERNAWATI DAMANIK	S-1	21	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
19	UHR E.H. TAMPUBOLON	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
20	NANDASARI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
21	SENDY BASTIAN	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
22	ENDANG SETIORINI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
23	ADITYA VERY SULISTYAWAN	D-III	21	84 %	-	15	13.5	10	38.5	96.25 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	89.5	TINGGI
24	TURBINA AZMI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
25	MULYANI	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
26	ISMADIRAJA	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
27	AYU APRILLY YANTI	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI
28	VIVI WALLY	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI
29	TAKBIR	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
30	RUSLAN	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh keaktifan dan partisipasi semua pegawai, dengan penanggung jawab IKU sebanyak 2 orang pengelola kepegawaian. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Gaji dan Tunjangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Operasional Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.543.235000,00, telah terealisasi sebesar Rp. 1.997.122.742,00 atau jika dipersentasekan sebesar 30,04%.

IK. 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Pemangkat (persen)

Indikator Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Berikut adalah capaian persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Pemangkat 2023 (Tabel 17).

Tabel 17. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-14					Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
Realisasi Triwulan II					2024				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	76	76	100	131,6	131,6

Capaian IK Persentase IK Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang diumumkan pada SIRUP pada triwulan II ini adalah 100%. Capaian ini berdasarkan nota dinas Sekretaris Jenderal Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025. Jika dibandingkan dengan target triwulan II dan tahunan maka persentasenya adalah 131,6%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ini merupakan IK baru di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian pada UPT lain, maka persentasenya sama 100%.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan identifikasi kegiatan Barang/Jasa pada akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat sesuai dan tepat sasaran. Indikator ini menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi SIRUP dan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PPN Pemangkat. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kedudukan berarti dalam penerapan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Seiring berkembangnya situasi kondisi perekonomian dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dan penerapan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2023 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan adanya reviu perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga dokumen tender menjadi *valid*. Proses pengadaan barang sudah dilakukan dengan menyesuaikan jenis dan spesifikasinya yang memenuhi komponen TDKN melalui *e-purchasing* sehingga dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi terkait *reviu* perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini, SDM yang terlibat adalah 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK sehingga pelaksanaan keduanya ditugaskan pada pegawai dengan jabatan fungsional P3T dan AP3T yang telah memiliki sertifikat tersebut. Dalam hal anggaran, IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 8.160.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa). Sampai dengan akhir triwulan II 2024, telah terealisasi sebesar Rp. 1.360.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 16,67%.

IK. 15. Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%) ;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot 20%) ;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Berikut adalah capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada PPN Pemangkat.

Tabel 18. Capaian IK Pengelolaan BMN

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-15					Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	81	-	-	-	-

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2024, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan II dengan capaian triwulan II tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target pada renstra. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2024.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu banyak BMN yang rusak berat tetapi masih tercatat pada SIMAK BMN dan belum dilakukan penghapusan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pelelangan barang dengan kondisi rusak berat melalui KPKNL. Serta telah ditetapkan PSP terhadap bangunan dan peralatan yang diadakan tahun 2023 dan melakukan inventarisasi BMN.

Pelaksanaan IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp.4.320.000,00, diperuntukan dalam kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorarium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang). Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp.720.000,00, atau dengan persentase serapan sebesar 16,67%. Sumber daya manusia yang mendukung penuh IKU ini adalah 3 (tiga) orang pengelola BMN dan dibantu 1 orang P3K yang menangani sarana dan prasarana.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Pelaporan Keuangan dan BMN. Inventarisasi BMN serta kegiatan lain berupa pemeliharaan, peningkatan nilai dari aset yang dilakukan oleh PPN Pemangkat. Melaksanakan penghapusan BMN setelah menerima Surat persetujuan penghapusan BMN, melakukan revisi RK BMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IK. 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Perhitungan secara system pada apliaksi OM-SPAN yang mengacu pada lampiran Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : ND-964/P33.2/2019, tanggal 29 Maret 2019. Berikut adalah capaian indikator tersebut pada 2024

Tabel 19. Capaian IK Nilai IKPA

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-16					Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)				
Realisasi Triwulan I					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Terget Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
96	82	91	88	89	92	85	100	109	118

Capaian IK Nilai IKPA pada triwulan II adalah sebesar 100, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target triwulan II maka persentasenya adalah sebesar 118, dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka persentasenya adalah sebesar 109%.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan *revolving* UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

Guna mendukung ketercapaian IKU ini, didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang telah disediakan adalah sebesar Rp.2755361000,00, diperuntukan untuk kegiatan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp. 16.412.000,00, honorarium pengelola anggaran kegiatan sebesar Rp. 76.680.000 serta efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.662.269.000,00. Sampai dengan akhir triwulan II 2025, telah terserap sebesar Rp.20.816.600,00 atau dengan persentase serapan sebesar 0,76%. Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan.

Kegiatan yang menunjang kinerja ini adalah kegiatan yang diperoleh dengan indikator revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM. Dilakukan penyesuaian halaman tiga DIPA setiap awal triwulan, melakukan monitoring terhadap penyampaian SPM dan data kontrak, serta penyampaian capaian output setiap tanggal 10 pada bulan berjalan.

IK. 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)

Kinerja perencanaan anggaran merupakan proses perencanaan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan bobot penilaian capaian output 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2%, dan penyerapan anggaran 9,7%. Berikut adalah tabel capaian IKU tersebut (Tabel 20)

Tabel 20. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran

SS-5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat				
IKU-17					Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)				
Realisasi Triwulan II					2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan II
-	-	-	-	-	71,5	-	-	-	-

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan II dengan capaian triwulan II tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2025.

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi. Faktor penghambat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan. Dari segi anggaran, untuk kelancaran kegiatan pendukung IKU ini telah disiapkan pagu sebesar Rp.26.800.000,00, diperuntukan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Sampai dengan akhir triwulan II 2025, belum ada realisasi dari kegiatan tersebut.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas adalah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

IK. 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP. Adapun sampai dengan akhir triwulan I 2024, capaiannya IKU sebagaimana tabel 21 berikut.

Tabel 21. Capaian IK Nilai SKM

SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	
IKU-18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	
Realisasi Triwulan II	2025	

2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I
0	0	0	0	89,4	88,5	88,5	95,0	107	107

Capaian SKM pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 95,0 dari target yang telah ditentukan sebesar 88,5 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 107%. Target triwulanan maupun target tahunan sama, sehingga persentase capaiannya sama sebesar 107%.

Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi dari Sungai Liat sebagaimana gambar disamping.



Nilai ini diperoleh atas upaya PPN Pemangkat dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, kompetensi SDM serta mendorong kepada setiap petugas layanan untuk selalu melakukan pengisian SKM pada setiap selesai melakukan pelayanan. Selain itu, petugas pelayanan juga wajib memberikan pendampingan kepada pengguna jasa pada saat melakukan pengisian SKM sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menjawab pertanyaan pada *form* SKM.

Guna mendukung kegiatan didukung oleh 17 petugas pelayanan dan dibentuk SK Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKM 2024. Disamping itu juga adanya penambahan SDM (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berakibat pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini antara lain; (1) Melakukan peningkatan fasilitas, (2) Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM dan (3) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM kepada petugas dan pengguna jasa.

3.5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumber daya telah diupayakan dan dilaksanakannya pembagian tugas pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menunjang setiap indikator kinerja. Berikut adalah efisiensi penggunaan anggaran per jenis kegiatan sampai dengan akhir tahun 2025.

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung di RKAKL	Per Indikator Kinerja Utama			Per Sasaran Kinerja		
			Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi	%	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Sosialisasi SOP jasa kepelabuhan di Pelabuhan Perikanan	89.850.000,00	31.560.500,00	35,13	89.850.000,00	31.560.500,00	35,13
Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan	109.708.000,00	39.258.000,00	35,78	207.352.000,00	121.083.900,00	58,40
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.000.000,00	9.278.900,00	51,55			

		Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	79.644.000,00	72.547.000,00	91,09			
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang berdaya Saing	Persentase Permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan	69.370.000,00	8.229.500,00	11,86	604.959.000,00	161.878.300,00	26,76
	Tingkat Kinerja Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	71.430.000,00	16.581.200,00	23,21			
		Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	29.150.000,00	1.726.400,00	5,92			
		Penerapan ISO 9001:2015 di Pelabuhan Perikanan	24.510.000,00	-	0,00			
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50			

		perbankan)						
		Sarana penunjang pemungutan PNBP Pelabuhan Perikanan	70.000.000,00	69.450.000,00	99,21			
		Penugasan Delegasi RI pada pertemuan the Regional Seminar and Capacity Building on Blue Ports Initiative (BPI) in Asia, FAO 2024	27.500.000,00	26.477.600,00	96,28			
	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	231.472.000,00	23.460.000,00	10,14			
		Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	31.570.000,00	9.405.000,00	29,79			
		Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	41.957.000,00	3.548.600,00	8,46			
Pengembangan dan Peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Pengendalian pengembangan Fasilitas pelabuhan	Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	472.000.000,00	40.630.662,00	8,61	1.569.709.000,00	310.999.350,00	19,81

yang Optimal	Perikanan Nusantara Pemangkat	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	768.548.000,00	103.627.600,00	13,48			
		Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	150.411.000,00	150.051.088,00	99,76			
	Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	178.750.000,00	16.690.000,00	9,34			
Pengelolaan Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi Ketentuan	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	25.000.000,00	18.010.000,00	72,04	38.000.000,00	18.010.000,00	47,39
Pengelolaan Awak Kapal perikanan yang Tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/awak Kapal perikanan	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000,00	-	0,00			
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai PM ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan zona integritas	32.000.000,00	-	0,00	9.530.002.000,00	4.452.175.529,00	46,72

	Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT)	8.899.000,00	-	0,00			
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.000.000,00	3.985.400,00	10,22			
	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	50.000.000,00	-	0,00			
		Gaji dan Tunjangan	5.445.678.000,00	3.032.535.144,00	55,69			
		Peningkatan Kapasitas ASN dalam rangka Peningkatan Layanan Publik dan Operasional Pelabuhan	147.168.000,00	2.320.000,00	1,58			
	Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)	4.896.000,00	2.040.000,00	41,67			

	Pemangkat							
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang)	4.320.000,00	1.800.000,00	41,67			
	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN)	118.501.000,00	43.675.000,00	36,86			
	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	61.000.000,00	5.416.000,00	8,88			
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Pelaksanaan SKM pelayanan publik	8.120.000,00	3.990.000,00	49,14			
		Forum konsultasi publik	10.570.000,00	-	0,00			
		Operasional Perkantoran	2.760.970.000,00	1.091.033.294,00	39,52			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	255.860.000,00	61.302.430,00	23,96			

		Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	209.726.000,00	43.240.000,00	20,62			
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	253.280.000,00	127.599.561,00	50,38			
		Pengadaan sarana perkantoran	96.304.000,00	28.000.000,00	29,07			
		Forum Kehumasan dan kegiatan PPID	23.710.000,00	5.238.700,00	22,09			

BAB IV

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur. Laporan Kinerja Triwulan II ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan II tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan capaian kinerja triwulan II ini ada beberapa permasalahan, yakni

1. Dipandang perlu adanya upaca pencegahan gratifikasi dari pengguna jasa kepada petugas pelayanan
2. Kondisi aset yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka penataan dan optimalisasi pemanfaatan lahan serta bangunan guna mendukung kinerja dan pelayanan pelabuhan secara berkelanjutan.
3. Perlu meningkatkan tertib administrasi dan transparansi pengelolaan lahan dan bangunan.

3.2. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan I 2025) telah ditindaklanjuti pada periode ini dengan

1. Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang bertempat di

Ruang Rapat Jejaring Nelayan pada hari Kamis, 26 Juni 2025. Kegiatan diikuti oleh 18 peserta. Materi yang disampaikan : 1. Pengelolaan data produksi, 2. Logbook penangkapan ikan; dan 3. Akses dan pemanfaatan informasi melalui sistem PIPP. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung penguatan sistem informasi pelabuhan, serta meningkatkan pemahaman teknis para pegawai terhadap pelaksanaan PIPP.

3.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi selama pencapaian kinerja triwulan II 2025, beberapa rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja sebagai berikut

1. Melakukan rapat internal membahas isu-isu terkini terkait pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai upaca pencegahan gratifikasi sekaligus wujud komitmen PPN Pemangkat dalam menjaga integritas.
2. Perlu adanya koordinasi dengan KPKNL Singkawang terkait pelaksanaan PP nomor 28 tahun 2021 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Melaksanakan rapat internal terkait pengelolaan data sewa lahan dan bangunan secara menyeluruh dan terstruktur. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan data informasi sewa lahan dan bangunan di PPN Pemangkat tercatat lebih detail, akurat, dan mudah diakses.